

BAB IV

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, yaitu meliputi:
 - a) Pemungutan uang dari parkir tidak diberinya karcis atau dokumen yang menandakan bahwa kendaraan tersebut telah di parkir di lahan tersebut sehingga terjadinya pungutan liar
 - b) Petugas parkir yang tidak profesional dalam memakai atribut parkir sehingga pengendara yang mau keluar dari lahan tersebut kebingungan saat membayar jasa parkir.
 - c) Sanksi administrasi yang diterima ialah pemberhentian dari Dinas yang terkait jika ditemukannya beberapa pelanggaran dari juru parkir tersebut.
 - d) Kontribusi retribusi tempat khusus parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang, yaitu dalam hal retribusi parkir yang diberikan pada pemerintah tidak pasti karna adanya penyelewengan dari pihak yang memegang lahan tersebut.
2. Faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang

Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, sebagai berikut:

- 1) Petugas Pemungut
 - a. Juru parkir liar;
 - b. Motor yang sama sekali tidak mau membayar retribusi parkir;
 - c. Masyarakat yang tidak membayar retribusi parkir akibat lalainya juru parkir;
- 2) Sarana Prasarana
 - a. Banyaknya parkir diluar badan jalan yang pengelolanya sama sekali tidak terkena pajak parkir dalam penyediaan tempat khusus parkir;
 - b. Banyaknya lahan parkir yang belum dikelola
 - c. Kurang tegasnya sanksi yang ada dalam perda; dan
 - d. Kurangnya Sosialisasi Pemerintah untuk menghimbau tentang partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
 - e. Masyarakat yang membuka usaha perparkiran di halaman rumah tanpa ada izin dari pemerintah daerah dan tanpa kontribusi untuk pemerintah daerah;
 - f. Tempat khusus parkir yang tidak bisa dikelola akibat dikuasai pemuda setempat;

- g. Pengelola cafe, rumah makan dan tempat hiburan yang mengelola parkir mandiri.

5.2 Saran

Setelah Penulis melakukan penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, maka peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Dinas Perhubungan Kota Kupang diharapkan melakukan prosedur dengan memberikan karcis kepada tukang parkir agar pendapatan sesuai dengan karcis yang di berikan.
- b. Melakukan pengawasan kepada juru parkir, serta memberikan beberapa fasilitas atau atribut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bachri, Bachtiar. 2010. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*. Surabaya : Universitas Negeri Surabaya
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Djaenuri. 2014. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Fidel. 2010. *Cara Mudah & Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*.
Jakarta : Murai Kencana.
- Gunawan. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta : PT Bumi Akasara.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah ed.Revisi*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Mamesah, D, J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta : Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- _____. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Mulyana. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- _____. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja
- Munir, Dasril, Henry ArysDjuanda dan HesselNogi S. Tangkilisan. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI

- Ngindana dan Imam Hanafi. 2012. *APBD Partisipatif: Sebuah Harapan yang Terabakan*. Malang : Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Pandiangan. 2013. *Administrasi Perpajakan Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Rahayu dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan Indonesia Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rahman, Herlina. 2005. *Pendapatan Asli Daerah*.
- Sabarno. 2008. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Siahaan, P. Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sidik, Machfud. 2002. *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Makalah disampaikan secara Orasi Ilmiah. Bandung :
- Supramono. (2010:2). *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- _____. 2013. *Hukum Pajak ed.2*. Yogyakarta: Sinar Grafika
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.

_____. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.

Sukmadinata, N.S. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cetakan ke 7. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Soemantri. 2014. *Otonomi Daerah*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Internet

- <http://erepo.unud.ac.id>, access 03 Maret 2023
- <http://elib.unikom.ac.id>, access 03 Maret 2023.
- <https://faktualnews.co>, access 03 Maret 2023
- <https://www.google.com/search?client=avast-a1&q=lahan+parkir&oq=lahan+parkir&aqs=avast..69i57.4976j0j9&ie=UTF-8> access 03 Maret 2023
- [https://www.google.com/search?q=lahan+parkir+di+kupang&client=avast-a1&sxsrf=ALiCzsZzUhHesVWtohwn3hPENXhsB0KKsg%3A1654964047434&ei=T7kYomFGtrAz7sPtdqNuA0&ved=0ahUKEwjJ6KbB5aX4AhVa4HMBHTVtA9cQ4dUDCA0&uact=5&oq=lahan+parkir+di+kupang&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAGAEecyBAGAEecyBAGAEecyBAGAEecyBAGAEecyBAGAEecyBAGAEedKBAhBGABKBAhGGABQ2h1Y8C1ggjtoAHACeAGAAQCIAQCSAQCYAQCgAQHIAQjAAQE&scient=gws-wiz](https://www.google.com/search?q=lahan+parkir+di+kupang&client=avast-a1&sxsrf=ALiCzsZzUhHesVWtohwn3hPENXhsB0KKsg%3A1654964047434&ei=T7kYomFGtrAz7sPtdqNuA0&ved=0ahUKEwjJ6KbB5aX4AhVa4HMBHTVtA9cQ4dUDCA0&uact=5&oq=lahan+parkir+di+kupang&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAGAEecyBAGAEecyBAGAEecyBAGAEecyBAGAEecyBAGAEecyBAGAEecyBAGAEedKBAhBGABKBAhGGABQ2h1Y8C1ggjtoAHACeAGAAQCIAQCSAQCYAQCgAQHIAQjAAQE&scient=gws-wiz) access 03 Maret 2023